

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan tujuan dan prinsip PTSP sebagaimana ditegaskan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. SOP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang masih menggunakan sistem *front office* dan *back office*. Dengan sistem ini berarti DPMPTSP Kabupaten Sintang hanya mengurus syarat administrasi perizinan, sedangkan Tim Teknis Terkait yang merupakan bagian dari *back office* memberikan rekomendasi dan syarat teknis. Tim Teknis Terkait ini tidak menjadi satu dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang. Tim Teknis berada di instansi (Operasional Perangkat Daerah (OPD)) terkait. Sehingga untuk beberapa pelayanan dokumen perizinan pihak DPMPTSP membawa dokumen perizinan ke kantor instansi terkait. Dengan demikian, penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang belum terintegrasi dalam satu kesatuan proses dan dapat dikatakan belum melaksanakan prinsip keterpaduan. Jangka waktu penyelesaian dokumen perizinan belum semuanya dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ditegaskan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang juga belum melaksanakan pelayanan secara elektronik seperti yang diwajibkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik meliputi:

a. Kendala teknis, yang meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya personil/sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 2) Tim teknis dari lembaga terkait perizinan (*back office*) belum berkantor di DPMPTSP Kabupaten Sintang sehingga untuk beberapa pelayanan dokumen perizinan pihak DPMPTSP membawa dokumen perizinan ke kantor instansi terkait;
- 3) DPMPTSP Kabupaten Sintang belum dapat menyelenggarakan sistem pelayanan secara elektronik sebagaimana diatur Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena belum ada SDM yang berkompeten untuk melaksanakannya;
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada DPMPTSP Kabupaten Sintang; dan

6) Posisi/letak DPMPTSP Kabupaten Sintang yang kurang strategis.

Kendala eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dalam menunjang kegiatan usahanya;
- 2) Luasnya wilayah pelayanan yang mencakup empat belas (14) kecamatan se-Kabupaten Sintang menyebabkan terbatasnya jangkauan kepada masyarakat;
- 3) Masih ada sebagian masyarakat yang mengurus perizinan apabila yang bersangkutan telah merasa ada keperluan untuk kepentingan tertentu;
- 4) Masih ada sebagian masyarakat yang mengurus perizinan melalui perantara orang lain/tidak langsung mengurus ke DPMPTSP Kabupaten Sintang.

b. Kendala yuridis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

- 1) Belum optimalnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai program serta regulasi di bidang perizinan dan nonperizinan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan PTSP;
- 2) Cepatnya perubahan aturan hukum di bidang perizinan dan nonperizinan tidak diimbangi dengan tindak lanjut petunjuk teknis pelaksanaannya;

3) Tidak siapnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan aturan hukum yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.”

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai bentuk pelayanan publik adalah:

a. Upaya untuk mengatasi kendala secara teknis adalah:

- 1) Melakukan penambahan SDM di DPMPTSP Kabupaten Sintang;
- 2) Selain menambah jumlah SDM, perlu dilakukannya peningkatan kualitas SDM yang ada melalui pelatihan dan pemberdayaan;
- 3) Mengenai tim teknis yang belum berkantor di DPMPTSP Kabupaten Sintang, nantinya pegawai instansi terkait yang menjadi tim teknis akan ada yang berkantor di DPMPTSP Kabupaten Sintang. Petugas itu akan khusus melayani dan mengecek perizinan sehingga pihak DPMPTSP tidak perlu lagi membawa dokumen perizinan ke kantor instansi terkait;
- 4) Segera menyelenggarakan pelayanan secara elektronik untuk mengoptimalkan pelayanan;
- 5) Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal;
- 6) Memanfaatkan anggaran dana yang dialokasikan untuk DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan sebaik mungkin;

7) DPMPTSP Kabupaten Sintang akan terus meningkatkan mutu pelayanan, agar kendala eksternal dapat diatasi sehingga pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak mengalami hambatan lagi.

b. Upaya untuk mengatasi kendala secara yuridis adalah:

- 1) Dengan cara melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai program serta aturan hukum di bidang perizinan dan nonperizinan; dan
- 2) Peraturan mengenai perizinan dan nonperizinan yang cepat berubah akan secepatnya diimbangi dengan tindak lanjut petunjuk teknis pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang harus melaksanakan pelayanan PTSP secara terintegrasi melalui internet, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan izin melalui perangkat elektronik tanpa perlu datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Sintang;
2. Tugas untuk mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon izin sebaiknya cukup dilakukan oleh petugas *front office*, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu penyelesaian pengurusan izin di DPMPTSP Kabupaten Sintang;
3. Membuat bagan alur PTSP yang lebih sederhana dan mudah dipahami;
4. Memperpendek lagi waktu penyelesaian dokumen perizinan;

5. Menempatkan Tim Teknis Terkait di kantor DPMPTSP Kabupaten Sintang agar prinsip keterpaduan penyelenggaraan PTSP dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. Menyediakan sistem pengaduan, masukan, dan saran secara *online* melalui *website* PTSP DPMPTSP Kabupaten Sintang, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Edy Priyono, dkk, 2015, *Kumpulan Praktik yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, KINERJA-USAID, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit NUANSA, Bandung.

Lijian Potlak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Bandung.

M. Ryaas Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Sirajuddin, Didik Sukrino, dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Sri Pudyatmoko. Y., 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta.

Tim Penerbit/Penyusun, 2013, *Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 & 96 tentang Pelayanan Publik dan Badan Layanan Umum serta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2012-2013*, PT. Tamita Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906. Jakarta.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Jasa Tertentu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 53.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016.

Website:

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/selenggara.html>, diakses tanggal 10 September 2017.

<https://www.apaarti.com/penyelenggaraan.html>, dipublikasikan pada hari Senin 28 Agustus 2017 oleh Staf, diakses tanggal 10 September 2017.

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/bentuk.html>, diakses 10 September 2017.

<https://karib.ayobai.org/2013/05/arti-dan-makna-bentuk.html?m=1>, diakses 10 September 2017.

<https://kbbi.web.id/pelayanan>, diakses 10 September 2017

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/publik.html>, diakses 10 September 2017.

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/prasarana.html>, diakses 31 Oktober 2017.